

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu permasalahan sampah akhir-akhir ini menjadi permasalahan serius yang dialami oleh setiap provinsi dan kota-kota yang ada di Indonesia. Sampah menjadi isu terbesar yang berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan, disisi lain belum adanya solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut (Devialesti & Trigunarso, 2023). Permasalahan sampah juga berkaitan erat dengan adanya peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, serta banyaknya aktifitas yang dilakukan oleh setiap penduduk sehingga dapat memperparah meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya (Afriandi et al., 2020). Selain itu, kebiasaan konsumsi masyarakat dalam penggunaan makanan serta minuman kemasan berkontribusi secara langsung terhadap kenaikan jumlah sampah yang sulit terurai (Wulandari, 2021).

Lampung merupakan Provinsi yang terletak di ujung timur Pulau Sumatera, dengan kondisi letak geografis yang strategis Lampung menjadi tempat transit dalam penyebrangan antar pulau yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Tidak hanya itu, Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung menjadi tempat transit dalam kegiatan perekonomian (Sitadevi, 2017). Sebagai daerah transit dalam kegiatan perekonomian membuat Kota Bandar Lampung memiliki infrastruktur yang lebih maju dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya di Lampung. Tidak hanya infrastrukturnya yang maju, Kota Bandar Lampung juga menjadi salah satu pusat perindustrian, pariwisata, dan perdagangan (Mahroji & Indrawati, 2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, PDRB Kota Bandar Lampung atas dasar harga berlaku tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 61,52 triliun menjadi 67,94 triliun rupiah (BPS, 2023).

Di samping perkembangan infrastruktur yang maju dan perekonomian yang terus berkembang Kota Bandar Lampung sebagai jantung ibukota Provinsi Lampung, selalu mengalami peningkatan urbanisasi. Tingkat urbanisasi Kota Bandar Lampung setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan (Phelia & Sinia, 2021). Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung, pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung sebanyak 1.091.685 jiwa. Kemudian pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan sebanyak 1.092.948 jiwa, yang berarti terdapat peningkatan 1.000 jiwa per semesternya (Wakik, 2023). Adanya peningkatan jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung disebabkan karena Kota Bandar Lampung sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan sehingga banyak masyarakat yang mencari pekerjaan di sana.

Dengan meningkatnya urbanisasi di Kota Bandar Lampung menjadi salah satu faktor permasalahan baru di Kota Bandar Lampung yaitu isu terkait sampah yang sangat kompleks. Adanya timbulan sampah di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan. TPA Bakung merupakan satu-satunya TPA regional yang menjadi tempat terakhir berlabuhnya semua sampah yang ada di Kota Bandar Lampung. Setiap harinya timbulan sampah yang masuk ke TPA Bakung mencapai 800-900 ton. Komposisi sampah tersebut terbagi menjadi 60% sampah anorganik yang didominasi oleh sampah plastik dan 40% merupakan sampah organik (Ajrina & Putri, 2020).

Kondisi tersebut juga diperparah dengan sistem pengelolaan yang kurang efektif. Sistem pengumpulan yang diterapkan di TPA Bakung masih menggunakan metode *door to door* atau proses pengumpulan secara langsung ditampung masuk ke dalam tempat pembuangan akhir tanpa adanya pengelolaan dan pemilahan secara baik. Sehingga memungkinkan bagi TPA Bakung mengalami *overload*, selain itu faktor lainnya ialah luas lahan TPA Bakung yang sangat terbatas yaitu seluas 14,2 hektare. Berdasarkan pada kisaran luas lahan dan masuknya timbulan sampah tersebut, TPA Bakung

hanya bisa menampung sampah untuk kisaran lima tahun kedepan (Sulis, 2023).

Pada tahun yang sama yaitu tahun 2020 terdapat peningkatan sampah domestik di Kota Bandar Lampung, per harinya volume domestik sampah meningkat sebesar 1.000 ton (Gautama, 2022). Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA Bakung selain dari faktor urbanisasi faktor lainnya disebabkan oleh banyak berdirinya hotel-hotel baru, mall baru, meningkatnya perekonomian, dan meningkatnya pariwisata di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, faktor tersebutlah yang menjadikan TPA Bakung mengalami *overload* dengan sangat cepat dan dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Bakung seperti longsor sampah, gas metana, dan cairan lindi yang sangat berbahaya karena didalamnya terkandung senyawa kimia sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar TPA (Avitadira et al., 2023)

Tabel 1. 1

Data Timbulan Sampah Tahun 2019-2022

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2022	Lampung	Kota Bandar Lampung	786.46	287.057.55
2021	Lampung	Kota Bandar Lampung	770.22	281.129.15
2020	Lampung	Kota Bandar Lampung	757.94	276.649.16
2019	Lampung	Kota Bandar Lampung	683.48	249.468.38
JUMLAH			2.998.09	1.094.304.24

Sumber: (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023)

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwasannya kondisi kenaikan timbulan sampah di Kota Bandar Lampung dari tahun 2019-2022 meningkat secara signifikan. Hal tersebut menandakan bahwa dengan kenaikan timbulan sampah secara signifikan dari tahun 2019-2022 dapat mempercepat kondisi TPA Bakung mengalami *overload*. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus segera memberikan tindakan secara nyata dalam mengatasi timbulan sampah yang terus meningkat setiap harinya ke TPA Bakung.

Tidak hanya itu, permasalahan terkait data volume valid sampah di lapangan sempat terhenti, dikarenakan kondisi timbangan di TPA Bakung yang mengalami kerusakan. Sehingga perhitungan data sampah yang masuk ke TPA Bakung per Januari 2021 dihitung berdasarkan jumlah mobil sampah yang masuk ke TPA Bakung. Hingga saat ini belum ada perbaikan mengenai timbangan tersebut, namun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung sedang merencanakan anggaran dana untuk memperbaiki timbangan sampah tersebut (Purnama, 2021). Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pembuat kebijakan sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terutama dalam mengatasi permasalahan sampah. Salah satunya pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Perda tersebut telah dijelaskan secara jelas pada Pasal 19 bahwasannya proses penanganan sampah dilakukan dengan cara pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Namun dalam pengimplementasiannya proses penanganan sampah di Kota Bandar Lampung khususnya pada TPA Bakung masih belum efisien, sehingga timbulan sampah mengalami *overload* (E. T. Putri & Ahyanti, 2022).

Permasalahan mengenai pengelolaan sampah di TPA Bakung juga dipaparkan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Lampung, bahwasannya TPA Bakung masih mengelola sampah dengan sistem *Open Dumping* (Sistem Terbuka) (Sardio, 2022). Sistem *Open Dumping* ialah pengelolaan sampah dengan sistem terbuka dimana sampah yang masuk di buang atau dibiarkan begitu saja di tempat pembuangan akhir tanpa adanya

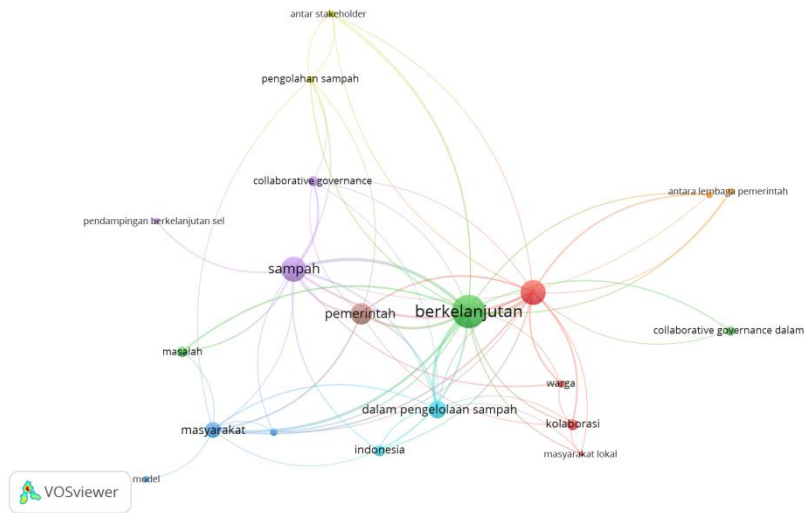
pengelolaan secara lanjut. Kemudian tidak adanya proses penutupan tanah sehingga dapat membahayakan masyarakat yang tinggal di sekitar TPA tersebut. Bentuk peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi timbulan sampah yang mulai mengalami *overload*, yaitu dengan pembangunan TPA regional baru sebagai pengganti TPA Bakung. Pembangunan TPA regional baru tersebut diusung oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengatasi timbulan sampah yang *overload* di TPA Bakung. Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memperbaiki pengelolaan sampah dari metode *Open Dumping* menjadi metode *Sanitary Landfill* (penimbunan berlapis) yang akan diterapkan di TPA regional baru sehingga permasalahan pengelolaan sampah di TPA lama tidak terulang di TPA baru (Manurung & Santoso, 2020) .

Apabila pergantian metode tersebut dilakukan di TPA Bakung akan menimbulkan permasalahan baru yaitu biaya yang tidak sedikit, tenaga, serta dampaknya bagi masyarakat. selain itu kondisi TPA yang sudah mengalami *overload* juga tidak memungkinkan untuk menerapkan metode *Sanitary Landfill*, karena harus melakukan penggalian pada tumpukan sampah. Metode *Sanitary Landfill* merupakan metode yang dianggap sesuai dalam pengelolaan sampah karena tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengolahan sampah. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan sampah yang sangat kompleks tidak hanya penggunaan metode yang tepat melainkan dibutuhkan juga peran dari setiap *stakeholder* terkait (Sayrani & Tamunu, 2020) .

Berdasarkan pada analisis Bibliometrik VOS Viewer yang diperoleh dari 75 literatur artikel jurnal terhadap penelitian terdahulu mengenai *Collaborative Governance* dalam manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan, diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

Gambar 1. 1

Visualisasi Network penelitian *Collaborative Governance* dalam Upaya Manajemen Sampah Menuju Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : (VOS Viewer, 2023)

Tabel 1. 2

Analisis Cluster Jaringan VOS Viewer Dengan Tema *Collaborative Governance* dalam Upaya Manajemen Sampah Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Words	Cluster
Kolaborasi, Masyarakat Lokal, Pengelolaan Sampah, Warga	1
Berkelanjutan, <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Sampah, Masalah	2
Masyarakat, Model, Pemerintah	3
Antar Stakeholder, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sampah	4
<i>Collaborative Governance</i> , Pendampingan Berkelanjutan, Sampah	5
Dalam Pengelolaan Sampah, Indonesia	6
Antar Lembaga Pemerintah, LSM	7
Pemerintah	8

Berdasarkan hasil analisis jaringan dari penelitian terdahulu menggunakan Bibliometrik VOS Viewer didapatkan hasil bahwa pada ke 8 cluster memiliki keterkaitan dengan topik *Collaborative Governance* dalam upaya manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan. Namun masih jarang ditemukan penelitian terdahulu yang membahas dan menggabungkan topik penelitian terkait *Collaborative Governance* khususnya dalam manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pada penelitian sebelumnya dalam menciptakan kolaborasi manajemen sampah yang berkelanjutan.

Dalam melakukan kolaborasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh DLH Kota Bandar Lampung merupakan lembaga pemerintah yang berkewajiban dalam mengupayakan pengelolaan dan mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung. Kemudian WALHI Lampung sebagai NGO juga memiliki peran penting dalam merekomendasikan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengelola dan mengatasi permasalahan sampah. Tidak hanya itu, kolaborasi yang terjalin diantara DLH Kota Bandar Lampung dan WALHI Lampung juga turut melibatkan *stakeholder* lainnya seperti mahasiswa dalam mensosialisasikan dan pengadaan seminar terkait pengelolaan sampah.

Masyarakat juga menjadi aktor penting sebagai penghasil sampah setiap harinya dan sebagai objek kebijakan yang diberlakukan. Tidak hanya itu WALHI Lampung juga ikut serta dalam merekomendasikan perencanaan pembentukan TPA regional baru bersama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Upaya-upaya tersebut merupakan langkah yang dapat memperbaiki kondisi lingkungan yaitu sampah di Kota Bandar Lampung, serta mengupayakan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan terkait permasalahan sampah tertuang dalam poin-poin *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Poin-poin SDGS yang berkorelasi dengan permasalahan sampah yaitu pada poin 6 yang menjamin Air Bersih dan Sanitasi Layak, kemudian poin 11 mengenai Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, dan pada poin 12

menjamin Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan. Terlihat dari tiga poin yang terkandung dalam SDGs, menandakan bahwasannya isu sampah menjadi isu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, langkah kolaborasi merupakan langkah tepat dalam mengatasi permasalahan sampah untuk mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sampah yang begitu kompleks di Kota Bandar Lampung, sehingga membutuhkan penanggulangan yang cukup serius dalam mengelola dan mengatasi permasalahan sampah untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah **Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam upaya manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan tahun 2021-2023 dengan studi kasus Kota Bandar Lampung?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengidentifikasi proses *Collaborative Governance* dalam upaya manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari adanya penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan pengembangan keilmuan serta penjelasan secara mendalam, terkait peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah dan NGO (*Non Government Organization*) dalam mengatasi permasalahan sampah yang saat ini permasalahan tersebut menjadi sangat kompleks serta peran dari masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung gerakan kolaboratif terhadap manajemen sampah menuju pembangunan yang berkelanjutan sehingga dengan adanya kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan terkait setiap peran dari *stakeholder* yang terlibat dalam mengatasi dan manajemen permasalahan sampah menuju pembangunan berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah

peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini menjadikan acuan bagi pemerintah ataupun instansi terkait dalam menjadikan rujukan kebijakan untuk manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu serta pengetahuan bagi pembaca terkait *Collaborative Governance* dalam upaya manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian, suatu perbandingan merupakan hal yang diperlukan untuk melihat *novelty* dari penelitian yang akan dikaji dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah kajian dan analisis dari perbandingan penelitian yang disusun oleh peneliti dengan penelitian terdahulu, serta menjadi bahan literature bagi penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1. 3

Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian terdahulu	Penelitian Penyusun
1.	(Nugroho et al., 2023)	<i>Good Environmental Governance</i> dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	Membahas tentang pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung	Kajian ini lebih berfokus dalam mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan teori <i>good environmental governance</i>	Kajian peneliti lebih menekankan pada kolaborasi dalam upaya manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan
2.	(Panjaitan et al., 2019)	Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta	Membahas tentang kolaboratif dalam pengelolaan sampah	Kajian ini lebih berfokus dalam pengelolaan sampah berdasarkan tata kelola kolaboratif yang dilihat dari faktor-faktor internal dan eksternal dengan berkolaborasi bersama BUMD (PT Jakpo), swasta, masyarakat, DPRD dan <i>stakeholder</i>	Kajian peneliti akan membahas terkait kolaborasi dalam upaya manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan antara DLH Kota Bandar Lampung dan WALHI Lampung

3.	(Alamanda et al., 2020)	Rancangan Solusi Sampah Dengan Konsep Focus Group Discussion (FGD) Pentahelix di Kabupaten Garut	Membahas terkait langkah-langkah inovatif dalam mengatasi permasalahan sampah	Kajian ini lebih terfokus dalam mengatasi permasalahan sampah melalui FGD dan mengatasi permasalahan sampah dengan langkah yang inovatif dan solutif dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan, kelembagaan, pengelolaan, ekonomi, koordinasi, serta kebijakan	Kajian peneliti akan membahas dan menekankan pada dua <i>stakeholder</i> yaitu DLH Kota Bandar Lampung dan WALHI Lampung dalam upaya manajemen sampah yang berkelanjutan dengan berdasarkan program-program yang telah dilakukan
4.	(Zitri et al., 2022)	Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste di Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix	Membahas terkait permasalahan sampah yang dilakukan dengan kolaborasi antar <i>stakeholder-stakeholder</i> terkait	Kajian terdahulu lebih menekankan pada program inovasi bebas sampah (<i>zero waste</i>) dengan berdasarkan model kolaborasi pentahelix yang terdiri dari pemerintah, swasta, media, akademisi, dan masyarakat	Kajian peneliti akan berfokus pada upaya manajemen sampah yang berkelanjutan dengan tidak hanya melalui program bebas sampah (<i>zero waste</i>) melainkan juga bagaimana cara dari pengelolaan sampah yang dibuang di TPA

5.	(Abdussamad et al., 2022)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango	Membahas dan menekankan dalam pengelolaan sampah dengan salah satu indikator pengelolaan sampah secara berkelanjutan	Kajian terdahulu lebih terfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang tergabung dalam program bank sampah. Dengan memperhatikan aspek diantaranya tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, dan berdasarkan nilai ekonomi	Kajian penelitian akan membahas dan terfokus tidak dalam satu kebijakan atau program melainkan tergabung dalam beberapa program yang dijalankan oleh kedua <i>stakeholder</i> dalam upaya manajemen sampah menuju pembangunan yang berkelanjutan
6.	(Utami et al., 2022)	Optimalisasi Pengelolaan Persampahan Melalui Penerapan Teknologi dan Inovasi di Kota Bandar Lampung	Membahas mengenai pengelolaan sampah yang kian menumpuk di TPA Bakung Kota Bandar Lampung	Kajian terdahulu memfokuskan pada optimalisasi strategi pengelolaan sampah dengan memanfaatkan teknologi inovasi dilihat dari aspek partisipasi masyarakat dan aspek operasionalnya	Kajian peneliti akan menekankan pada peran kedua <i>stakeholder</i> dalam menjalankan program-program yang telah dirancang guna menyelesaikan permasalahan sampah dari segi pengelolaan agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan

7.	(Alfian & Phelia, 2021)	Evaluasi Efektifitas Sistem Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di TPA Sarimukti Kota Bandung	Membahas tentang sistem pengelolaan sampah dalam mengatasi isu permasalahan sampah saat ini	Kajian terdahulu lebih menekankan terhadap evaluasi dalam efektivitas dalam proses pengangkutan sampah dan pengelolaannya di TPA. Sehingga dengan adanya pengelolaan dan pengangkutan sampah yang baik dapat meminimalkan dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat	Kajian peneliti akan lebih menekankan pada pengelolaan dalam upaya manajemen sampah yang berada di TPA Bakung dan berkolaborasi antara DLH Kota Bandar Lampung dan WALHI Lampung
8.	(Sari et al., 2021)	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Bagi Warga di Kalurahan Bakung Kota Bandar Lampung	Membahas terkait pengelolaan sampah yang mengajak dan berdampak langsung bagi masyarakat sekitar TPA	Kajian penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengelolaan limbah sampah rumah tangga. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan praktek kepada masyarakat sekitar TPA yaitu dengan merubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat	Kajian peneliti akan membahas tidak hanya sampah rumah tangga melainkan secara keseluruhan sampah yang masuk ke TPA. Berupa sampah rumah tangga, sampah plastik, dan sebagainya dengan cara pengelolaan yang berbeda dilihat dari jenis sampahnya

9.	(Santosa & Sujito, 2021)	Potensi Ekonomi dan Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Bandar Lampung	Membahas terkait pengelolaan sampah dengan didasarkan pada UU Nomor 18 Tahun 2008 dalam mendorong pengelolaan sampah langsung berdasarkan sumber dari sampah tersebut	Kajian terdahulu lebih memfokuskan dalam segi nilai ekonomi dari adanya pengelolaan sampah yang bersumber dari sampah pasar. Serta bertujuan dalam memecahkan permasalahan timbulan sampah pasr yang menumpuk dengan pengelolaan secara baik berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang berada di Kota Bandar Lampung	Kajian peneliti lebih memfokuskan tidak hanya pada limbah sampah rumah tangga melainkan dari keseluruhan jenis sampah dengan memperhatikan pengelolaan dan pembangunan secara berkelanjutan
----	--------------------------	---	---	--	---

10	(Qadri et al., 2020)	Inovasi Manajemen Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan di Kota Pontianak Berbasis Aplikasi	Membahas terkait manajemen pengelolaan sampah secara general, terkhusus dalam pengelolaan sampah di TPA yang didasarkan pada pemilahan pengelolaan sampah menurut jenisnya	Penelitian ini lebih menekankan dalam inovasi manajemen pengelolaan sampah yang didasarkan pada wawasan lingkungan. Inovasi tersebut berupa program ANGKUTS atau angkut sampah yang berbasis aplikasi, program inovasi tersebut dibuat untuk mengatasi permasalahan sampah dengan metode dipilah di angkut	Kajian peneliti akan membahas terkait dengan pengelolaan manajemen sampah yang berkelanjutan, sehingga terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut dilakukan dengan kolaborasi berdasarkan program-program yang telah disepakati oleh kedua <i>stakeholder</i>
11	(A. A. Putri, 2023)	Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara	Membahas terkait pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup. Hal itu dilakukan karena untuk mengurangi tumpukan sampah yang dihasilkan setiap harinya dengan memanfaatkan pengelolaan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)	Kajian terdahulu lebih membahas terkait sejauh mana keberhasilan atau efektivitas pengelolaan sampah dalam upaya melihat seberapa baiknya pengelolaan sampah yang telah dijalankan. Pengukuran tersebut diukur berdasarkan tiga indeks yaitu pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan pemrosesan sampah	Kajian peneliti akan memfokuskan pada penyelesaian permasalahan sampah dengan tindakan kolaborasi dari kedua <i>stakeholder</i> dalam mencapai manajemen pengelolaan sampah untuk pembangunan yang berkelanjutan.

12	(Afriandi et al., 2020)	Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbulan dan Karakteristik Sampah di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan	Membahas terkait pengelolaan sampah yang disebabkan adanya timbulan sampah serta dikelola berdasarkan karakteristik atau jenis dampak sehingga bisa teratasi dengan maksimal	Kajian terdahulu lebih menekankan atau menilau optimlalisasi pengelolaan sampah organik dan anorganik. Kemudian membahas terkait faktor-faktor dari adanya timbulan sampah yang kian menumpuk	Kajian peneliti akan membahas mengenai keberhasilan atau efektivitas kolaborasi yang terjalin dalam mengatasi permasalahan sampah
13	(Djogeh Harmana et al., 2021)	Pengelolaan Sampah Berbasis <i>Collaborative Governance</i> di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara	Membahas mengenai adanya <i>collaborative governance</i> dalam mengelola sampah dengan memperhatikan peran dari masing-masing <i>stakeholder</i> terkait	Kajian terdahulu lebih terfokuskan pada optimalisasi peran dari setiap <i>stakeholder</i> dalam mengelola sampah	Kajian peneliti akan menekankan tidak hanya optimalisasi dari kedua <i>stakeholder</i> dalam mengatasi permasalahan sampah, melainkan juga agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan
14	(Apriliani & Maesaroh, 2021)	Efektivitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang Melalui Program SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah)	Membahas terkait pengelolaan sampah secara keseluruhan yang masuk dalam TPA	Kajian terdahulu berfokus pada efektivitas dari adanya program SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah)	Kajian peneliti akan membahas terkait program-program yang diusung oleh kedua <i>stakeholder</i> dalam mengatasi permasalahan sampah untuk mengupayakan manajemen sampah dalam pembangunan berkelanjutan

15	(Rahmawati et al., 2021)	Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Wilayah Perkotaan di Indonesia	Membahas terkait pengelolaan sampah secara berkelanjutan di daerah perkotaan	Kajian terdahulu lebih menekankan pada pengelolaan secara berkelanjutan di kota-kota di Indonesia dengan tidak terlalu terfokus pada proses penyelesaian secara kolaborasi	Kajian peneliti akan menekankan pada upaya manajemen pembangunan berkelanjutan terhadap permasalahan sampah secara kolaborasi
16	(Susanti & Arsawat, 2021)	Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Desa Tunjuk, Tabanan	Membahas terkait pengelolaan sampah yang menjadi permasalahan utama saat ini, hal tersebut dilakukan dalam untuk edukasi kepada masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan	Kajian terdahulu lebih menekankan pada strategi alternatif pengelolaan sampah melalui pemberdayaan masyarakat. pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut dilakukan melalui program bank sampah dengan mensosialisasikan konsep 3R (<i>Rreduce, reuse, recycle</i>)	Kajian peneliti akan memfokuskan pada manajemen sampah melalui kolaborasi antar <i>stakeholder</i> berdasarkan program-program yang telah disepakati agar menciptakan pembangunan berkelanjutan
17	(Wati et al., 2021)	Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia	Membahas mengenai pengelolaan sampah melalui cara pemilahan sampah berdasarkan jenis-jenis sampah	Kajian terdahulu lebih menekankan pada efektivitas kebijakan dalam mengelola sampah yang didasarkan pada program pengelolaan terpadu 3r	Kajian peneliti akan menekankan pada program-program yang terjalin dari kedua <i>stakeholder</i> dalam memanajemen sampah untuk pembangunan berkelanjutan

18	(Dewanti et al., 2020)	Analisa Efektifitas Bank Sampah Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah dalam Mencapai <i>Smart City</i> di Kabupaten Kulon Progo	Didasarkan atas permasalahan sampah yang belum maksimal dalam proses pengelolaan, sehingga membutuhkan pemahaman dan program yang tepat baik kepada masyarakat maupun <i>stakeholder</i> terkait dalam mengatasi permasalahan sampah	Kajian terdahulu lebih memfokuskan pada pembahasan seberapa efektifnya program bank sampah sebagai alternative pengelolaan sampah, sehingga terciptanya <i>smart city</i>	Kajian peneliti akan membahas upaya kolaborasi dalam mengatasi dan mengelola sampah guna terciptanya pembangunan berkelanjutan yang terangkum dalam poin-poin SDGs
19	(Muchsin & Saliro, 2020)	Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah	Membahas mengenai pengelolaan sampah berdasarkan pada peraturan baik Perda dan Perpu	Kajian terdahulu lebih membahas terkait peran dari pemerintah desa dalam mengelola sampah berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah	Kajian peneliti akan memfokuskan bukan hanya pada peraturan yang ditetapkan, melainkan juga dari proses kolaborasi yang terjalin dalam mengelola sampah

20	(Septiani et al., 2019)	Pengelolaan Sampah Plastik di Salatiga: Praktik dan Tantangan	Mengkaji mengenai pengelolaan sampah yang menjadi permasalahan utama saat ini, karena timbulan sampah setiap harinya terus meningkat	Kajian terdahulu mengkaji terkait pengelolaan sampah khususnya pada pengelolaan sampah plastik. Hal tersebut dilakukan dengan mengedukasi masyarakat serta dibutuhkan nya peran dari pemerintah	Kajian peneliti akan mengkaji bukan hanya pengelolaan pada sampah plastik saja, melainkan juga semua jenis sampah yang masuk ke TPA. Hal tersebut dilakukan dengan kolaborasi antar kedua <i>stakeholder</i> untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan
----	-------------------------	---	--	---	--

Berdasarkan pada tinjauan pustaka di atas, serta fakta-fakta yang telah dijabarkan dapat memperkuat dasar dari adanya penelitian ini. Maka dari itu, dibutuhkannya langkah-langkah yang solutif, cepat, dan inovatif dalam mengatasi permasalahan yang begitu kompleks. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada bentuk pengelolaan sampah melalui program-program, pengelolaan berdasarkan teknologi, strategi alternatif, dan efektivitas dari adanya program yang di usung. Masih jarang membahas terkait dengan pelibatan *stakeholder-stakeholder* terkait dalam proses pengelolaan maupun manajemen sampah khususnya dalam membangun pembangunan yang berkelanjutan. Dimana pembangunan berkelanjutan merupakan program utama Indonesia pada saat ini dan permasalahan sampah merupakan salah satu isu yang tergabung dalam program tersebut. Selain itu, belum banyaknya penggunaan teori-teori kolaborasi DeSeve (Moore,2009) dalam penelitian terdahulu.

Sehingga diperlukan peninjauan secara lebih mendalam terkait kebijakan, program yang dikeluarkan oleh pemerintah dan *stakeholder* agar dapat mengatasi permasalahan sampah berdasarkan cara manajemennya agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan melalui gerakan kolaborasi. Oleh karena itu, *novelty* penelitian ini ialah untuk mengetahui proses kolaborasi yang terjalin antara DLH Kota Bandar Lampung sebagai lembaga pemerintah dan WALHI Lampung sebagai NGO dalam upaya manajemen sampah menuju pembangunan yang berkelanjutan. Studi kasus dari penelitian ini mengambil studi kasus di Kota Bandar Lampung, dikarenakan Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung yang menjadi pusat dari pemerintahan, ekonomi, dan pusat bagi masyarakat baik dari luar Kota Bandar Lampung maupun dari Kota Bandar Lampung untuk mencari pekerjaan.

1.6 Kerangka Teori

a. *Collaborative Governance*

(Ansell & Gash, 2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai bentuk struktur pemerintahan yang saling berkaitan antara satu atau lebih instansi publik dengan para pemangku dari kalangan non-negara terkait mekanisme pengambilan keputusan, secara kolaborasi dan dapat mencapai keputusan bersama yang berorientasi untuk mendapatkan suatu formulasi kebijakan atau mengenai program serta manajemen asset publik. Dari konsep tersebut kemudian dilebur oleh (Emerson et al., 2012) yang mendefinisikan *collaborative governance* secara lebih luas ialah suatu mekanisme kebijakan publik dalam mengambil suatu keputusan dengan adanya kontribusi dari masyarakat dan instansi publik secara konstruktif. Sektor pemerintah dari berbagai level seperti sektor privat, dan instansi publik lainnya memerlukan suatu kolaborasi dalam mencapai implementasi dari adanya tujuan kebijakan publik yang berlaku. Dengan begitu suatu kolaborasi yang terjalin diantara lebih dari dua *stakeholder* dapat membangun suatu sumber daya yang berkualitas. Namun hal itu akan sulit dicapai apabila hanya dilakukan secara individual.

Menurut Agranof & McGuire (2009), mendefinisikan *collaborative governance* sebagai tekanan dalam melakukan suatu kolaborasi secara sukarela dan hubungan secara horizontal yang terjalin diantara sektor partisipan. Hal tersebut dikarenakan adanya klien yang sering menuntut dan melebihi kapabilitas terhadap peran suatu organisasi, serta dibutuhkannya interaksi berbagai organisasi yang terlibat. Adanya kolaborasi dapat menjadikan struktur pemerintahan menjadi efektif serta dapat menaikkan suatu permintaan dari pengelolaan organisasi, sektoral, dan dari lintas pemerintah.

Bingham berpendapat dalam (Sasti Ihtiarni, 2023) bahwa, “kolaborasi merupakan hubungan kerjasama lintas batas antar multi-sektoral dan multi-lembaga dalam mencapai tujuan yang diharapkan bersama.” Hal itu

menggambarkan bahwasannya kolaborasi dengan melibatkan banyaknya aktor dan saling bekerjasama untuk untuk tujuan yang dicapai, para aktorpun tidak hanya bekerja di dalam satu sektor melainkan juga di beberapa sektor lainnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tata kelola kolaborasi pemerintahan merupakan suatu sistem pemerintahan dengan menerapkan metode kolaboratif yang melibatkan para aktor dari pemerintah maupun non-pemerintah untuk mencapai tujuan bersama terkait aktifitas dari berbagai bidang permasalahan publik yang terjadi. Mengacu pada berbagai definisi *collaborative governance*, dapat disimpulkan bahwasannya munculnya hubungan saling ketergantungan antar pihak dapat menumbuhkan sikap membutuhkan satu sama lain sehingga dapat menjalin kolaborasi (Avitadira et al., 2023).

b. Collaborative Governance dalam Manajemen Sampah

Indonesia sedang mengalami permasalahan sampah, dikarenakan setiap tahunnya volume sampah terus mengalami peningkatan. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan banyak kerusakan pada lingkungan, seperti tercemarnya air tanah, meningkatnya efek dari gas rumah kaca, serta bencana banjir yang dapat mengalami kerugian material dan immaterial (Avitadira et al., 2023). Permasalahan sampah menjadi isu kultural sehingga dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan. Volume sampah yang terus bertambah berkorelasi dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Penyebab lainnya dari peningkatan volume sampah bisa disebabkan oleh pemerintah tidak serius mengatasi permasalahan tersebut, kondisi masyarakat kota dilihat dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan penerapan metode pengelolaan sampah yang tidak sesuai (Isnaini & Diamantina, 2020). Kegiatan dalam mengurangi timbulan sampah dapat dilakukan dengan penerapan 3R (*Reduce Reuse, dan Recycle*) atau mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Metode tersebut dapat diterapkan oleh masyarakat dalam mengolah kembali khususnya sampah rumah tangga

sehingga dapat mengurangi timbulan sampahs setiap harinya (Devialesti & Trigunarso, 2023).

Indikator dari permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi saat ini ialah peningkatan hasil timbulan sampah, TPA yang terbatas, institusi yang belum mengelola dengan baik, dan rendahnya tingkat pelayanan pada pengelolaan sampah saat ini (Qadri et al., 2020). Menurut pandangan Amuwaraharja terdapat empat aspek-aspek yang perlu dipahami dalam proses pengelolaan sampah, sebagai berikut:

1. Aspek sosial, berisikan melibatkan masyarakat terkait sosialisasi pengelolaan sampah
2. Aspek ekonomi, berisikan tenaga kerja yang terserap, rendahnya konflik dengan masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah
3. Aspek lingkungan, berisikan meminimalisir dampak dari sampah terhadap lingkungan yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, resiko bibit penyakit dapat berkurang, dan keindahan lingkungan
4. Aspek teknologi, terkait efisiensi tumpukan sampah yang berkurang, lokasi dan teknologi yang tersedia, mudahnya pengoperasian teknologi, dan optimalisasi sumber daya (Susanti & Arsawat, 2021).

Kemudian dalam mengatasi permasalahan dan pengelolaan sampah diperlukannya peran-peran dari setiap *stakeholder* terkait, sehingga konsep *collaborative governance* menjadi gerakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan sampah (Chotimah et al., 2022). Peran pemerintah, swasta, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat menjadi sangat penting dalam berlangsungnya kolaborasi demi tercapainya tujuan bersama (Annas & Rusnaedy, 2020). Dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah juga harus memasukkan unsure dari pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*), hal itu bertujuan untuk sebuah pengambilan keputusan dalam berjalannya kolaborasi harus memperhatikan pengelolaan yang bersifat berkelanjutan (Panjaitan et al., 2019).

c. Keberhasilan *Collaborative Governance*

DeSeve (Moore, 2009) menjelaskan bahwasannya terdapat delapan kunci ukuran keberhasilan berjalannya tata kelola kolaborasi, sebagai berikut:

1. *Network Structure* (Struktur Jaringan)

Mendeskrripsikan pencerminan yang terkandung secara sama kemudian unsur fisik penanganan suatu jaringan yang saling berkaitan dan menyatu satu sama lainnya. Dilhat dari perspektif pemerintahan yang kolaboratif, elemen jaringan tidak diperbolehkan membangun struktur hirarki dengan satu pihak. Melainkan pemerintahan yang kolaboratif tidak membentuk hirarki dan bersifat secara *organis*. Dapat disimpulkan bahwa semua aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi memiliki tanggung jawab, kesetaraan, hak, kewajiban, kekuasaan dan kesempatan yang sama.

2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap Tujuan)

Indikator ini menjadi landasan pada sebuah jaringan yang harus memiliki sebuah komitmen dalam mencapai tujuan yang positif secara bersamaan. Tujuan tersebut terkandung dalam misi organisasi pemerintah, tidak hanya itu dengan terjalannya suatu komitmen tidak diperbolehkan membela satu pihak dengan kata lain menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu, dengan terjalannya kolaborasi harus secara bersamaan menemukan sebuah solusi yang didasarkan tujuan bersama dari setiap *stakeholder*.

3. *Trust Among The Participants* (Kepercayaan)

Keyakinan yang didasarkan hubungan sosial dan profesionalisme dari setiap *stakeholder* terkait informasi yang diberikan dalam suatu jaringan yang sama dan untuk tujuan yang dicapai secara bersamaan. Sehingga kepercayaan menjadi sangat penting dalam menyatukan perbedaan antar *stakeholder* sebagai pihak yang *professional* dalam sebuah gerakan kolaborasi untuk memperoleh kesuksesan bersama.

4. *Governance*

Tata kelola ialah suatu kepercayaan dalam hubungan yang terjalin dengan para pemangku kepentingan, dalam kata lain ialah pemerintah. Kemudian terdapat suatu peraturan yang telah disetujui secara bersama oleh para *stakeholder*, dan setiap *stakeholder* memiliki kebebasan dalam berkolaborasi. Maka dari itu, tata kelola pemerintah dapat dikatakan sebagai tata kelola jika anggota dan bukan anggota dibentuk secara jelas.

5. *Access to Authority* (Akses terhadap Kekuasaan)

Akses yang terhubung pada kekuasaan menjadi tolak ukur kejelasan suatu prosedur yang luas. Oleh karena itu, suatu aturan atau kewenangan sudah memiliki kejelasan dan dapat diterima dalam menjalankan perannya oleh setiap *stakeholder* sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan.

6. *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas)

Pembagian akuntabilitas ialah suatu manajemen yang ditata dan dikelola bersama dengan *stakeholder* dan setiap keputusan yang dibuat oleh semua anggota harus dialokasikan dengan tanggung jawab agar mendapat hasil yang diharapkan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam berkolaborasi dibutuhkannya kejelasan dalam mengalokasikan sesuatu hal dan harus dipertanggung jawabkan antara setiap *stakeholder* tidak terkecuali masyarakat dalam pelibatan keputusan kebijakan.

7. *Information Sharing* (Berbagi Informasi)

Berbagi informasi ialah suatu kemudahan akses, pengamanan informasi pribadi yang dimiliki setiap anggota selama pihak tersebut masih diterima. Namun, berbeda halnya pada non-anggota yang akan mendapatkan keterbatasan pada saat mengakses informasi. Oleh karena itu, adanya suatu tata kelola kolaboratif, dapat membagi informasi secara jelas, dan setiap masing-masing dari *stakeholder* bisa mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi.

8. *Access to Resource* (Akses Terhadap Sumber Daya)

Akses pada sumber daya ialah tersedianya aspek teknis, keuangan, manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, dari setiap pemangku kepentingan harus memiliki kejelasan terkait sumber daya yang tersedia.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan sebuah konsep yang dilakukan dan dapat membantu pengoperasian sebuah penelitian berdasarkan pada kerangka teori dan tinjauan pustaka yang telah di telaah. Berikut definisi konseptual dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Collaborative Governance*

Setelah menelaah dari berbagai sumber teori, *collaborative governance* didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan dalam mengatasi suatu permasalahan publik yang sedang terjadi serta melibatkan dari berbagai pemangku kepentingan baik itu dari pemerintah, swasta, LSM, maupun masyarakat dalam meningkatkan kualitas dari hasil-hasil program yang telah dilaksanakan. Maka dari tu, setiap program maupun kegiatan yang diusung secara bersamaan dapat mencapai tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dari masing-masing instansi yang terlibat.

2. Manajemen Sampah

Berdasarkan pada penelaahan terkait manajemen sampah dalam penelitian terdahulu, maka dapat ditarik suatu definisi konseptual dari manajemen sampah ialah pengelolaan terhadap sampah baik itu dari jenis sampah rumah tangga, plastik, kardus, ataupun disebut sebagai sampah organik dan anorganik yang masuk ke dalam suatu penampungan akhir atau TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Hal itu dilakukan guna mengatasi permasalahan sampah yang terus mengalami kenaikan volume sampah, sehingga dapat mengatasi permasalahan sampah yang terjadi sesuai dengan metode pengelolaan yang dianjurkan.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Definisi konseptual pembangunan berkelanjutan adalah suatu program yang diusung oleh PBB dan terkandung dalam 17 poin-poin SDGs, dengan tujuan mengupayakan kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi sehingga dapat menjamin kehidupan yang panjang yang dapat mensejahterakan dan memberikan keselamatan kepada kehidupan generasi mendatang. Dengan arti lain, program-program yang diusung tersebut dapat memberikan dampak positif bagi generasi selanjutnya dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan indikator pelengkap dalam suatu penelitian yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti. Penelitian ini menggunakan teori DeSeve (Moore, 2009) yang memiliki delapan indikator. Dipilihnya teori dari DeSeve (Moore, 2009), menurut peneliti dapat membantu menjawab rumusan masalah penelitian secara spesifik dan mendalam terkait tema yang diambil dikarenakan indikator yang terdapat dalam teori tersebut. Berikut merupakan definisi operasional berdasarkan teori DeSeve (Moore, 2009), sebagai berikut:

Tabel 1. 4

Indikator penelitian

Indikator	Parameter	Keterangan
1. <i>Netowrk Structure</i>	a. Kolaborasi Pemerintah-NGO-masyarakat b. Sinergitas Pemerintah-NGO-masyarakat	- Perjanjian, kesepakatan MoU, dan lain sebagainya dalam upaya manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung - Penguatan kolaborasi antar instansi terkait (rapat-rapat koordinasi, dan rapat gabungan dari instansi yang terlibat) - Struktur bersifat vertikal

		dan hirarkirs dalam suatu instansi
<i>2.Commitment to a Common Purpose</i>	<p>a. Tujuan bersama</p> <p>b. Kesepahaman</p>	<p>- Visi, misi dan tujuan dalam upaya manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung</p> <p>- Pemantapan tujuan bersama dalam upaya manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung (dilaksanakan dalam bentuk program atau produk kebijakan yang terjalin antar instansi terkait)</p>
<i>3.Trust Among The Participants</i>	<p>a. Profesionalitas</p> <p>b. Ketepatan pelaksanaan tugas</p>	<p>- Terimplementasikan program atau produk kebijakan yang diusung oleh setiap instansi terkait</p> <p>- Program yang dilaksanakan harus tepat waktu, sasaran, dan biaya.</p>
<i>4.Governance</i>	<p>a. Transparan</p> <p>b. Akuntabilitas</p> <p>c. Partisipasi</p>	<p>- Kemudahan dalam mengakses data bagi para NGO dan masyarakat terkait upaya manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung</p> <p>- Program-program yang diberikan kepada instansi terkait harus bisa dipertanggung jawabkan</p> <p>- Kontribusi aktif dari para instansi terkait (baik berupa gagasan pemikiran, sarana dan prasarana, serta anggaran)</p>
<i>5.Access to Authority</i>	<p>a. Kewenangan</p> <p>b. Desain proses</p>	<p>- Dasar hukum manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung</p> <p>- Program utama atau produk kebijakan dalam</p>

		manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung - Acuan standarisasi dalam manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung
<i>6.Distributive Accountability/ Responsibility</i>	a. Penataan b.Pengelolaan manajemen	- Prosedur manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung - Proses peencanaan serta evaluasi setiap kebijakan program manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung
<i>7.Information Sharing</i>	a.Kemudahan akses informasi b.Manajemen informasi	- Akses informasi dapat dijangku dengan mudah oleh umum terkait produk kolaborasi - Antar instansi terkait saling berkoordinasi - Sistem informasi dan komunikasi
<i>8.Access to Resource</i>	a. Sumber daya manusia b. Sumber daya finansial (keuangan) c. Sumber daya sarana dan prasarama	- Kewenangan petugas struktural dan lapangan - Kewenangan NGO dan masyarkat - Kebijakan anggaran dalam pelaksanaan program oleh pemerintah dan instansi terkait lainnya - Fasilitas pendukung

1.9 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya membutuhkan alat instrument penelitian yaitu berupa metode penelitian sehingga penelitian tersebut menjadi penelitian

yang baik dan sesuai dengan kaidah struktur penelitian. Maka dari itu, berikut merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian yang baik.

1.10 Jenis Penelitian

Dalam menyusun karya ilmiah, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut pendapat Jhon Creswell (2008) dalam buku (Semiawan, 2010), penelitian kualitatif merupakan suatu penelusuran atau pendekatan guna mendalami serta memahami adanya suatu gejala-gejala. Kemudian, berdasarkan pendapat (Walidin et al., 2015) penelitian kualitatif merupakan proses penelitian dalam memahami dan menelaah terkait fenomena-fenomena, baik dari segi manusia atau sosial guna menciptakan suatu gambaran hasil yang kompleks dan menyeluruh dan disajikan dengan kata-kata, penjelasan dari suatu pandangan yang didapatkan dari informan, dan proses tindakan dilakukan secara alamiah. Selanjutnya, metode kualitatif yang akan digunakan oleh peneliti ialah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu pengkajian terhadap suatu permasalahan yang muncul di kehidupan masyarakat serta tindakan yang menjadi aturan terhadap masyarakat dengan kondisi tertentu, seperti hubungan, pendapat, proses dan sikap yang saling berkaitan dan secara langsung dapat mempengaruhi fenomena dari masyarakat tersebut (Samsu, 2017).

Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan metode penelitian yang tepat dimplementasikan dalam suatu penelitian dengan penggunaan pertanyaan berupa *how* atau *why*, serta memudahkan bagi peneliti yang mempunyai waktu sedikit dalam mengontrol suatu peristiwa dalam penelitian dan penelitiannya berfokus pada fenomena yang kontemporer (Yin, 2009). Sementara itu menurut pandangan (Ridho et al., 2020), pendekatan studi kasus merupakan pengkajian suatu permasalahan yang mendasar dan mendalam sesuai dengan keadaan secara nyata serta menyertakan sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu, pendekatan penelitian studi kasus, dirasa relevan

dengan topik pembahasan peneliti untuk memahami secara dalam dengan penggunaan pertanyaan-pertanyaan dalam mengetahui informasi mengenai fakta-fakta yang ada, gambaran kondisi secara sistematis yang berkaitan dengan tata kelola kolaborasi antara DLH Kota Bandar Lampung dan WALHI Lampung dalam upaya manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

1.11 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bandar Lampung, khususnya pada pemerintah kota setempat yaitu DLH Kota Bandar Lampung dan WALHI Lampung sebagai NGO yang berkaitan dengan topik penelitian. Alasan peneliti memilih Kota Bandar Lampung, dikarenakan Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung yang menjadi tiang dan pusat pemerintahan, perekonomian, serta tempat masyarakat dalam mencari pekerjaan.

1.12 Jenis Data

a. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2012) data primer merupakan data yang bersumber dari pengumpulan data secara langsung dari sumber utama yaitu naasumber maupun informan dan objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi pada DLH Kota Bandar Lampung, WALHI, dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, akan ditambahkan dengan data sekunder yang terdapat dalam berbagai sumber yaitu, artikel jurnal, artikel media masa, dan media sosial terkait sebagai data pendukung dan tambahan penelitian.

1.12 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpul data wawancara atau berupa wawancara mendalam (*in depth interview*) dalam melakukan proses pengumpulan data informasi secara mendalam secara langsung dengan melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan lima *stakeholders* yaitu, DLH Kota Bandar Lampung, BAPPEDA Kota Bandar Lampung, WALHI Lampung, MAHUSA UNILA, dan Masyarakat. Dengan penggunaan teknik pengumpulan data wawancara secara mendalam sehingga dapat memperoleh data informasi yang optimal dari narasumber.

b. Dokumentasi

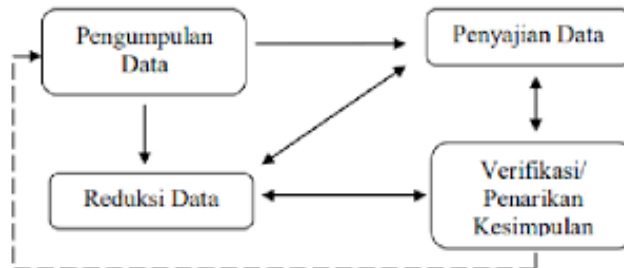
Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan proses pengumpulan data berupa notulensi, catatan, atau transkrip hasil wawancara yang telah dilakukan dalam sebuah penelitian. Hasil data yang diperoleh dari pengumpulan data dokumentasi tersebut kemudian menjadi acuan sumber data utama bagi peneliti dalam menyusun sebuah penelitian yang baik.

1.14 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Neong Muhadjir (1998) dalam (Rijali, 2019), menjelaskan bahwa pencarian yang dilakuakn secara sistematis berupa catatan dari hasil observasi, wawancara, dan sebagainya dalam peningkatan pemahan sebuah kasus penelitian yang disajikan menjadi sebuah temuan. Setelah data-data penelitian didapatkan kemudian dilakukan proses analisis secara interaktif yang dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1994). Adapun alur model interaktif yang dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1994), sebagai berikut:

Gambar 1. 2

Alur analisis interaktif model



Sumber: Alur interaktif model (Miles & Huberman, 1994)

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode dan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara secara mendalam (*in depth interview*) kepada para pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan kepada DLH sebagai pemerintah, WALHI sebagai NGO dan masyarakat. Kemudian teknik pengumpulan data secara dokumentasi berupa data transkrip hasil wawancara dan data sekunder didapat dengan pengumpulan data studi pustaka.

b. Reduksi Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data, data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan proses reduksi data. Proses reduksi data menjadi proses terpenting karena data-data yang diperoleh dilakukan pemilahan, perangkuman sesuai dengan pola dan tema penelitian. Dalam proses ini diperlukan pemahaman yang kritis agar data yang didapatkan dapat sesuai dengan kejadian sebenarnya di lapangan.

c. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data dianggap cukup, data-data yang sudah dianalisis kemudian dituangkan dalam sebuah uraian secara singkat, bentuk diagram, tabel, grafik, dan sebagainya sehingga dapat memudahkan bagi pembaca dalam melihat hasil penelitian yang dilakukan. Dikarenakan penyajian data merupakan dasar terpenting dalam mendeskripsikan informasi hasil penelitian yang berbentuk sebuah naratif.

d. Penarikan Kesimpulan

proses terakhir dari alur penelitian interaktif model ini ialah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan digambarkan dengan sebuah narasi secara ringkas, padat, dan jelas terhadap sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan. Setelah proses penarikan kesimpulan, peneliti juga berkewajiban dalam memverifikasi data-data diolah agar dapat meminimalisir adanya kesalahan.

1.15 Unit Analisis Data

Tabel 1. 5

Unit Analisis Data

No.	Jenis Data	Narasumber	Data yang dibutuhkan	Teknik Pengumpulan Data
1.	Data Primer	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	Bagaimana proses kolaborasi yang terjalin, data sampah, program atau produk kebijakan yang diusung, landasan hukum yang digunakan, <i>stakeholder</i> apa saja yang terlibat	Wawancara mendalam

			dalam proses kolaborasi, visi dan misi lembaga, kesepakatan tertulis (MoU), strategi atau target berjalannya kolaborasi, pembagian topoksi bagi setiap <i>stakeholder</i> yang terlibat, struktur organisasi, anggaran yang sudah dikeluarkan, sarana dan prasarana, sanksi atau prosedur dalam kolaborasi yang dijalankan	
2.	Data Primer	Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung	Proses kolaborasi yang terjalin, peran-peran apa yang telah dilakukan, program dan kebijakan yang dikeluarkan, perjanjian tertulis (MoU), pelibatan <i>stakeholder</i> lainnya, keberhasilan kolaborasi, efektivitas pelaksanaan, kelebihan serta kekurangan dalam menjalin kolaborasi	Wawancara mendalam
3.	Data Primer	BAPPEDA Kota Bandar Lampung	Proses kolaborasi yang terjalin, peran-peran apa yang telah dilakukan, program dan kebijakan yang dikeluarkan dalam pembangunan yang	Wawancara mendalam

			berkelanjutan, perjanjian tertulis (MoU), pelibatan <i>stakeholder</i> lainnya, keberhasilan kolaborasi, efektivitas pelaksanaan, kelebihan serta kekurangan dalam menjalin kolaborasi	
4.	Data Primer	Masyarakat	Pelibatan kolaborasi dalam bentuk apa, dampak yang diterima, kemudahan akses informasi, program yang sudah dan sedang berjalan, saran dalam berkolaborasi	Wawancara mendalam
5.	Data Primer	Mahasiswa Pencinta Alam FH UNILA	Proses kolaborasi yang terjalin, peran-peran apa yang telah dilakukan, perjanjian tertulis (MoU), pelibatan <i>stakeholder</i> lainnya, keberhasilan kolaborasi, efektivitas pelaksanaan, kelebihan serta kekurangan dalam menjalin kolaborasi	Wawancara mendalam
6.	Data Sekunder	Artikel jurnal, media massa, media sosial terkait	Data pendukung	Dokumentasi